

Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado Bitung

Ria Rizkiah

Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Korespondensi : ria.rizkiah@mail.ugm.ac.id

Abstrak

KAPET Manado Bitung adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan khususnya daerah Timur Indonesia dengan melibatkan dunia usaha dan diharapkan kawasan ini bisa menjadi pusat pertumbuhan di wilayah Sulawesi Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah berbagai macam strategi, dan strategi tersebut harus implementasikan, karena implementasi merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka, berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan KAPET Manado Bitung, metode penelitian yang digunakan yaitu metode deduktif kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan melakukan observasi dan wawancara, kemudian untuk menganalisis hasil wawancara dan observasi tersebut digunakan metode triangulasi. Sehingga dapat ditemukan bahwa, implementasi kebijakan KAPET Manado Bitung telah berhasil hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, komunikasi serta koordinasi yang terjalin dengan baik antara pihak terkait, serta kondisi politik yang stabil sehingga memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dengan aman di KAPET Manado Bitung.

Kata-kunci : Implementasi, Kebijakan, KAPET Manado Bitung

Pendahuluan

Dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih lanjut di kawasan timur Indonesia khususnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, pemerintah menerbitkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO - BITUNG.

Kebijakan ini diambil dalam rangka pemerataan pembangunan, dimana pembentukan Kawasan ini didasarkan pada teori pusat pertumbuhan (*growthpole*) dengan harapan kawasan ini akan mampu membangkitkan perekonomian wilayah sekitarnya. Untuk menjalankan kebijakan tersebut maka dibentuklah BP KAPET sebagai operator utama untuk mengelola KAPET. Dalam menjadi-

kan KAPET Manado Bitung sebagai pusat pertumbuhan maka banyak rencana-rencana yang disusun agar tujuan tersebut tercapai. Namun, rencana-rencana tersebut hanya akan terlihat hasilnya jika mampu diimplementasikan.

Implementasi merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Secara etimologis pengertian implementasi menurut *Kamus Webster* (Wahab, 1997:64) yaitu: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect-to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi kebijakan merupakan penjabaran dari suatu keputusan untuk dituangkan kedalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran.

Sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, George C Edward III (dalam Subarsono, 2009) mengemukakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni : komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi implementor.

Sedangkan menurut van Meter dan Von Horn dalam Nawawi (2009) menjelaskan bahwa 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- Standar dan sasaran kebijakan,
- Sumber daya, Komunikasi,
- Karakteristik agen pelaksana,
- Kondisi sosial,
- ekonomi dan politik dan,
- Disposisi implementor.

Sehingga berdasarkan hal tersebut yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi KAPET Manado Bitung, digunakan empat faktor yang merupakan gabungan dari variable-variable yang telah dipaparkan para ahli tersebut yaitu : sumber daya manusia, komunikasi dan struktur birokrasi serta kondisi politik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pemikiran deduktif, yaitu dengan menguji terori-teori yang dipakai dan membuktikannya dilapangan. Selain itu penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif dan berdasarkan bentuk termasuk dalam penelitian kualitatif.

Lokasi penelitian adalah KAPET Manado Bitung dengan wilayah meliputi Kota Manado (ibu Kota Provinsi), Kota Bitung, serta sebagian Kabupaten Minahasa. Variabel dan indikator pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kriteria	Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan KAPET	Sumber daya manusia (implementator)	Pengetahuan implementator terhadap KAPET
	Komunikasi dan struktur birokrasi	Tersedianya dukungan dan koordinasi

		antara pihak yang terlibat baik pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat
	Stabilitas politik	Kondisi politik yang stabil serta kondisi kota yang kondusif.

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan langsung di lokasi KAPET Manado Bitung dengan melihat kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan tersebut. Dan kemudian didukung wawancara mendalam (*indept interview*), dengan para informan terkait seperti : Badan Pengelola KAPET, aparat pemerintah terkait, para pelaku usaha di KAPET serta masyarakat.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisa informasi-informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut (Bungin,2007).

Hasil dan Pembahasan

1. Sumber daya manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan sumber daya yang tersedia, salah satunya adalah manusia. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Badan pengelola KAPET Manado Bitung adalah operator tunggal yang ditugaskan untuk mengelola KAPET. Para pejabat yang bertugas di BP KAPET Manado Bitung diangkat langsung oleh Gubernur, sehingga untuk melaksanakan semua tugas tersebut BP KAPET Manado Bitung perlu didukung oleh tenaga profesional. Dari segi kualitas SDM, BP

KAPET Manado Bitung dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman dalam bidang pembangunan.

Para direktur yang dipilih adalah dari para pensiunan PNS dan akademisi. Para pensiunan tersebut merupakan mantan pejabat penting di lingkungan Pemda Provinsi Sulawesi Utara. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu direktur di BP KAPET Manado Bitung :

“sebelum diangkat menjadi direktur utama saya bertugas sebagai kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Minahasa Utara dan juga saya aktif menjadi dosen dibidang yang sama” (Kepel, Charles direktur Utama Bidang Perencanaan, 2017)

Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Noldy, Tuerah:

“sebelum diangkat dan menjalankan tugas di BP KAPET Manado Bitung, saya merupakan salah satu dosen senior di Universitas Samratulangi, di fakultas Ekonomi”(Tuerah, Noldy Ketua Harian BP KAPET Manado Bitung,2017).

Para pejabat yang diangkat oleh Gubernur dan dipercaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di BP KAPET Manado bisa dikatakan awet artinya jarang terjadi pergantian. Hal ini dikarenakan para pejabat tersebut benar-benar telah dipilih sesuai dengan kemampuan untuk menduduki posisinya masing-masing. Kehadiran para direktur utama tersebut kemudian didukung oleh para staf pelaksana yang direkrut secara kompetitif. Sebesar dari staf tersebut berlatar belakang pendidikan terakhir strata satu (S1), seperti sarjana teknik, pertanian, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Penempatan mereka benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sedangkan untuk staf pendukung diambil dari mereka yang berpengalaman dengan pendidikan minimal SLTA atau setara. Itupun bekerja sebagai sopir dan urusan akomodasi lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Claudia Bangkang dan Mirko Kambey:

“saya sudah ada di KAPET sejak tahun 2001, saya juga sering dilibatkan dalam pembuatan dokumen-dokumen penting di KAPET Manado Bitung, pendidikan terakhir saya S1 arsitektur UKDW”(Bangkang, Claudia staff bidang perencanaan, 2017).

“jabatan saya di BP KAPET Manado Bitung adalah sebagai Kepala Kantor dan saya adalah sarjana perikanan” (Kambey, Mirko Kepala Kantor BP KAPET Manado Bitung 2017).

Dengan bekal latar belakang pendidikan dan keahlian SDM tersebut, BP KAPET Manado Bitung mampu menjalankan semua kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

2. Komunikasi dan struktur birokrasi

Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (Van Mater dan Varn Horn, dalam Nawawi 2009). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. KAPET merupakan hal yang kompleks yang memerlukan pengerahan semua sumber daya secara besar-besaran dalam jangka waktu lama serta memerlukan kontribusi seluruh sektor dan stakeholders. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa KAPET tidak akan berjalan dengan baik jika setiap yang terlibat didalamnya tidak terdapat komunikasi yang baik.

a. Badan Pengelola (BP) KAPET dengan Badan Pengembangan (Bapeng) KAPET

Sesuai Keppres Nomor 150 Pasal 2 Tahun 2000, Badan Pengembangan (Bapeng) KAPET diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kebuda-

yaan dan Pariwisata, Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, Kepala BPN serta Bappenas sebagai Sekretaris.

Peran Bapeng KAPET dalam pengelolaan KAPET saat ini lebih pada perumusan desain besar serta menjalankan fungsi pengawasan, anggaran. Kendala yang terjadi adalah kinerja Bapeng KAPET tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya. Bapeng KAPET sepertinya mati suri dan bahkan seakan lupa kalau KAPET itu masih ada. Disisi lain, koordinasi antara Tim Teknis dengan Bapeng KAPET juga dinilai rendah, karena setiap tahun Tim Teknis selalu gagal bertemu dengan Bapeng KAPET. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Bapeng KAPET terhadap pengembangan KAPET dinilai masih rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Kepel, Charles.

“..awalnya kami masih saling berkoordinasi dengan BAPENG KAPET dipusat namun makin kesini koordinasi tersebut semakin jarang, BAPENG seperti telah mati suri, kami malah lebih banyak berkoordinasi dengan Kementerian PU karena ada program yang dikerjakan bersama kementerian PU ada bidang pengembangan yang mengurus KAPET (Charles, Kepel – Direktur Utama Bidang Perencanaan BP KAPET Manado Bitung, 2017).

Kemudian pernyataan tersebut lebih dikuatkan lagi oleh pernyataan dari Bapak Noldy, yang merupakan Ketua Harian KAPET Manado Bitung beliau mengatakan bahwa:

“Bapeng selalu menginginkan ada masukan dari BP KAPET Manado Bitung terkait perkembangan setiap sektor unggulan, namun kami lebih banyak berkoordinasi langsung dengan Menteri Perekonomian bukan lagi melalui lembaga BAPENG. Hal yang dibicarakan lebih mengenai pelaku bisnis serta bagaimana cara untuk mengkoordinasi pelaku bisnis tersebut dengan pemerintah daerah” (Tuerah, Noldy Ketua Harian BP KAPET Manado Bitung, 2017).

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa komunikasi diantara BP KAPET Manado Bitung dan BAPENG cukup lemah, hal ini mengakibatkan seringkali pemecahan masalah yang dihadapi KAPET menjadi lamban, terutama yang memerlukan koordinasi serta fasilitasi pemerintah pusat.

b. Internal Badan Pengelola(BP) KAPET

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000, Ketua Badan Pengelola KAPET dijabat oleh Gubernur dan membawahi empat direktur yaitu direktur umum, direktur Perencanaan, direktur pembangunan, dan Direktur Pengembangan Bisnis. Hubungan kerja di internal BP KAPET Manado Bitung cukup sederhana. Ketua BP KAPET langsung dapat memberikan tugas kepada wakil ketua sebagai pelaksana harian. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Ketua Badan Pengelola KAPET dibantu oleh Wakil Ketua sebagai Pelaksana Harian yang bertugas mengelola KAPET secara Professional.

Ketua Pelaksana Harian dan Anggota Badan Pengelola KAPET diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola, namun persyaratan kualifikasi personil ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis Badan Pengelola KAPET dengan menitikberatkan pada ke-mampuan profesionalitas serta kemampuan berkomunikasi dengan dunia usaha.

Peran lembaga pengelola KAPET selain sebagai perumus kebijakan, juga sebagai fasilitator antara pengusaha dengan pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu melakukan promosi mengenai keberadaan dan potensi KAPET serta menjembatani kebutuhan dan pemecahan masalah yang ditemui investor kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya wakil ketua dapat langsung memberikan arahan kepada para direktur pelaksana sebagai implementor di lapangan. Para direktur yang dibantu oleh beberapa kepala divisi dan staf bertugas melaksanakan aktivitas harian yang berkaitan dengan implementasi program KAPET bersama para staf pendukungnya.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa dalam koordinasi implementasi kebijakan dalam internal BP KAPET Manado Bitung tidak mengalami kesulitan.

c. Badan Pengelola (BP) KAPET dengan Pemerintah Provinsi

Sesuai Keppres Nomor 150 Tahun 2000 Pasal 5 ayat 6 tugas B KAPET adalah untuk membantu pemerintah daerah setempat dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis yang berguna bagi pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan permohonan perizinan investasi di lokasi KAPET.

Namun dari beberapa kegiatan lintas sektoral dan lintas dinas yang pernah diadakan, BP KAPET sering menemui kesulitan dalam menjalin kerjasama dan koordinasi. Hal ini disebabkan karena masing-masing dinas merasa dirinya berkedudukan lebih tinggi dari BP KAPET karena status BP KAPET sendiri hanya badan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, BP KAPET Manado Bitung menjalin interaksi lebih erat dengan Gubernur sebagai pihak eksekutif karena Gubernur merupakan ketua BP KAPET. Interaksi ini kemudian memberikan dampak yang baik karena Gubernur mulai memberikan dukungan terhadap BP KAPET Manado Bitung. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktur Utama bidang Perencanaan bahwa :

"karena Gubernur sebagai Ketua BP. KAPET, semua perencanaan dan pembangunan infrastruktur di wilayah KAPET di bicarakan khusus dengan Gubernur sebagai kepala daerah. Sangat sering Gubernur menugaskan BP. KAPET untuk pengurusan perencanaan dan administrasi proyek-proyek strategis yang di biayai melalui APBN. Pada hal-hal tertentu Gubernur bertindak sebagai Ketua BP. KAPET melakukan pertemuan-pertemuan dengan menteri dan DPR-RI di Senayan untuk menyampaikan kebutuhan infrastruktur di daerah" (Kepel, Charles Direktur Utama Bidang Perencanaan, 2017).

Peranan Bappeda sebagai perencana pembangunan regional lintas daerah pernah digantikan oleh BP KAPET Manado Bitung, hal ini disebabkan karena Bappeda kehilangan fungsi dan kewenangannya, karena adanya kewenangan langsung yang dilimpahkan kepada masing-masing kabupaten/ kota, termasuk dalam hal penataan ruang. Dengan keadaan tersebut, pada tahun 2002 BP KAPET menginisiasi penyusunan revisi tata ruang provinsi, hal ini menjadi penting karena dokumen tersebut merupakan acuan utama investor dalam melakukan investasi. Kemudian pada tahun 2004, Bappeda kembali pulih sejalan dengan terbitnya UU 32 Tahun 2004 dan perencanaan tata ruang kembali berhirarki, dimana Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus mengacu kepada perencanaan tata ruang provinsi.

Rencana-rencana yang diinisiasi oleh BP KAPET pada umumnya telah diakomodasi dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara, misalnya pembangunan Jalan Tol Manado Bitung, *International Hub Port* di Bitung, dan sebagainya. Bahkan pemprov Sulawesi Utara telah menyusun rencana pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung pembangunan IHP di Bitung. Adanya dukungan terhadap rencana-rencana tersebut dapat dikatakan bahwa koordinasi antara BP KAPET Manado Bitung dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan baik dan salah satu faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut adalah dukungan dari Gubernur.

d. Badan Pengelola (BP) KAPET dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari hirarkis-struktural Pemerintah kabupaten tidak memiliki keterkaitan dengan BP-KAPET Manado-Bitung secara langsung. Sehingga jika terdapat permasalahan yang terjadi pada pengusaha, maka BP KAPET Manado Bitung harus menginformasikannya ke pemerintah provinsi, dalam hal ini pihak yang dihubungi adalah Gubernur. Hal ini juga berlaku jika BP KAPET mempunyai urusan dengan pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu BP KAPET harus menghubungi Gubernur. Kemudian selaku ketua KAPET Gubernur

akan menyurati Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada bersama-sama dengan dinas terkait. Struktur birokrasi seperti ini sebenarnya cukup menghambat kecepatan penyelesaian masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Denny Silomba:

“yang saya tahu BP KAPET Manado Bitung lebih banyak berinteraksi dengan pemerintah provinsi (BAPPEDA Provinsi Sulut) karena KAPET adalah program provinsi, kami sebagai Pemerintah Kota dilibatkan jika ada rencana KAPET Manado Bitung yang berlokasi lintas wilayah, seperti rencana pembangunan jalan tol Manado-Bitung itupun lebih kepada pengurusan perizinan lokasi,” (Silomba, Denny Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kota Manado, 2017).

BP KAPET tidak memiliki kewenangan besar dalam pelaksanaan karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten yang memiliki kewenangan dan anggaran dalam melakukan pembangunan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, BP KAPET mau tidak harus selalu dan bahkan lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dari pemerintah provinsi kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, karena KAPET adalah ranah pemerintah provinsi sehingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota tidak begitu signifikan.

e. Badan Pengelola (BP) KAPET dengan investor

Selain dengan kalangan pemerintah, kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang penting juga harus terjalin yaitu dengan para investor. Karena investor disini berperan sebagai aktor yang dapat menggerakkan pembangunan dengan cara menanamkan modalnya dalam bentuk pendirian usaha-usaha. Karena dana yang dibutuhkan tidak akan cukup jika hanya ditanggung oleh pemerintah. Kerjasama dan komunikasi yang dilakukan dengan investor adalah dengan memberikan mereka kemudahan dalam pengurusan perizinan, pemberian insentif perpajakan serta

dengan memberikan pelayanan khusus yang disebut “aftercare service” bagi perusahaan yang mengalami permasalahan. Dari semua cara tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi iklim investasi yang ada di KAPET Manado Bitung, dimana setiap tahunnya selalu ada investor yang datang dan menanamkan modalnya di KAPET Manado Bitung.

3. Stabilitas Politik

Dalam pelaksanaannya KAPET memerlukan komitmen politik yang jelas dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota, memerlukan konsisten kebijakan turunannya, dan perlu diterapkan secara berkesinambungan dalam jangka panjang hingga tercapainya tujuannya, sebagaimana yang dimaksud dengan teori pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Maka menurut Rattanawong (2014) salah satu kunci keberhasilan kawasan ekonomi Khusus adalah kondisi politik yang stabil pada daerah tersebut.

Konsistensi dan dukungan dari pemerintah akan sangat berpengaruh dalam menentukan keberlangsungan KAPET. Gubernur sebagai pemangku kebijakan ditingkat Provinsi memiliki andil yang penting dalam pengoperasian KAPET.

Gubernur secara langsung ditunjuk sebagai ketua KAPET yang bertugas untuk mengontrol kegiatan yang ada di KAPET dan dibantu BP KAPET. Selain itu Gubernur juga berhak mengangkat pejabat dalam membantu tugasnya di KAPET. Para direktur utama yang ada di KAPET dipilih dan diangkat langsung oleh Gubernur.

Hal ini biasanya akan berdampak ketika Gubernur selesai dengan masa jabatannya maka pejabat yang didalamnya pun akan ikut berganti. Namun hal tersebut tidak berlaku di BP KAPET Manado Bitung. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa para pejabat yang ada di KAPET Manado Bitung jarang sekali diganti seperti yang diungkapkan oleh Noldy, Tuerah:

“...pada tahun 1998 saya diangkat Gubernur menjadi salah satu staff ahli di BP KAPET Manado Bitung, baru pada tahun 2001 setelah KAPET secara resmi beroperasi

kemudian saya diangkat menjadi salah satu dirut di BP KAPET Manado Bitung. Kemudian pada tahun 2005 saya diangkat menjadi Ketua Harian oleh Gubernur untuk membantu Gubernur menjalankan tugasnya di KAPET (Noldy, Tuerah, Ketua Harian KAPET Manado Bitung, 2017).

Selain itu kondisi politik yang stabil merupakan hal yang penting dalam menarik investor untuk datang. Investor asing pada dasarnya tidak akan berinvestasi pada Negara yang kondisikeamanan politiknya tidak stabil. Berdasarkan data investasi asing yang di KAPET Manado Bitung dapat diartikan bahwa kondisi keamanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara cukup baik, karena banyaknya investasi asing yang ada.

Masyarakat di KAPET Manado Bitung tergolong masyarakat perkotaan yang terbuka terhadap dunia luar dan hal ini telah berlangsung bertahun-tahun. Selama ini tidak ada kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah, yang bertentangan dengan adat istiadat setempat. Konflik sosial antarmasyarakat belum pernah terjadi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat Kota Manado mereka mengungkapkan bahwa:

"Manado merupakan kota yang sangat toleren, masyarakatnya tidak gampang terprovokasi oleh hal-hal yang berbau agamis, hal ini membuat masyarakat di Kota Manado hidup berdampingan dengan baik antara satu dan lainnya, saya dari lahir sudah di Manado rasanya sangat jarang mendengar adanya kerusuhan" (Mokodompit, Lili Masyarakat Kota Manado, 2017).

Hal ini juga diungkapkan oleh Iqbal Sungkar :

"di lingkungan yang minoritas ini (saya seorang muslim) saya rasa toleransinya masih tinggi, selain itu menurut saya keamanan kota Manado masih terjaga dengan baik walaupun kemarin sempat terjadi kerusuhan antar kampung tapi saat sudah ada tim yang dibantu masyarakat yang membantu POLDA mengamankan Kota Manado" (Sungkar, Iqbal mahasiswa, 2017).

Selain itu di KAPET Manado-Bitung sangat jarang terjadi unjuk rasa /buruh/LSM. Dari hal diatas dapat diketahui bahwa stabilitas politik serta keamanan diwilayah KAPET Manado Bitung cukup baik untuk mengundang investor datang.

Kesimpulan

Berdasarkan semua penjelasan diatas bahwa Implementasi Kebijakan KAPET Manado Bitung jika dilihat dari 3 (tiga) variabel tersebut dapat dikatakan sudah berhasil.

Hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang ada didalam BP KAPET sangat berkompeten karena memang dipilih berdasarkan keahlian dan kemampuannya, kemudian didukung oleh komunikasi yang terjalin antar pihak yang terjalin dengan baik walaupun terdapat beberapa permasalahan yang namun tidak terlalu berpengaruh karena BP KAPET mampu mengelola KAPET dengan baik serta didukung juga kondisi politik yang stabil, dan kondisi kota yang kondusif aman, dimana masyarakatnya sangat toleren sehingga sangat jarang terjadi konflik sosial antar masyarakat.

Sehingga dari semua faktor tersebut investor dapat dengan nyaman berinvestasi di KAPET Manado Bitung, dimana kehadiran investor inilah yang menjadi sasaran KAPET karena untuk mengembangkan kawasan tersebut peran investor sangat dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1998 tentang penetapan Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Manado-Bitung.
- Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
- Abdul W, Solichin. (1997). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- A.G. Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bungin, Burhan, H. M. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. CV Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Rattanawong, A. Dkk. (2014). *Key Success Factors of Special Economic Zone for Thailand. Proceeding of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2014*. Vol II, IMECS 2014. Hongkong.